**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 31850-31856

# Etika Politik Mohammed Arkoun

**Johan[1], Sutriawal[2]**
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, [2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[1]Johanelbugisy7@gmail.com, [2]Sutriawal52@gmail.com

Published: November, 2025

## ABSTRACT

*As a scientific endeavor, philosophy is divided into several branches, mainly according to the branch discussed. The two main branches of philosophy are theoretical philosophy and practical philosophy. Philosophy thinks about what exists, while practical philosophy interprets how humans imagine what exists. The branch of philosophy that directly interprets human practice is ethics. Ethics deals with human responsibilities and obligations. In relation to politics, political ethics excludes human responsibilities and obligations as humans towards the state, applicable laws, and so on. This article discusses political ethics in Mohammed Arkoun's thought and its relevance to Islamic thought. The data collection method used is documentation study (library research). The findings in this research are that Mohammed Arkoun's political ethics has several important points, namely, 1) criticism of Islamic traditions and modernity, 2) deconstruction of religious political narratives, 3) humanism in politics, 4) pluralism and democracy. Mohammed Arkoun interprets this political ethics as an effort to deconstruct hegemonic political and religious authority.*

***Keywords: ethics, politic, Mohammed Arkoun***

## ABSTRAK

Sebagai sebuah usaha ilmiah, filsafat dibagi dalam beberapa cabang, terutama menurut cabang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat ialah filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis mempertanyakan tentang apa yang ada, sedangkan filsafat praktis mempertanyakan bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Adapun cabang filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia. Dalam kaitannya dengan politik, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia terhadap negara, hukum yang berlaku, dan sebagainya. Artikel ini membahas tentang etika politik dalam pemikiran Mohammed Arkoun dan relevansinya terhadap pemikiran keislaman. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi (*library research*). Adapun temuan dalam penelitian ini ialah etika politik Mohammed Arkoun memiliki beberapa poin penting yaitu, 1) kritik atas tradisi Islam dan modernitas, 2) dekonstruksi narasi politik agama, 3) humanisme dalam politik, 4) pluralisme dan demokrasi. Mohammed Arkoun merumuskan etika politik ini sebagai upaya mendekonstruksi otoritas politik dan keagamaan yang bersifat hegemonik.

**Kata Kunci: Etika, Politik, Mohammed Arkoun,**

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Diskursus tentang etika merupakan salah satu cabang dari beberapa cabang studi tentang filsafat yakni aksiologi. Wacana aksiologi termasuk dalam topik penting dalam filsafat yang berbicara mengenai nilai baik-buruk serta nilai indah-tidak indah (etika dan estetika). Dalam khazanah pemikiran Islam, etika bersama politik dan ekonomi seringkali dimasukkan dalam filsafat praktis yang mana filsafat praktis itu sendiri berbicara tentang segala sesuatu "sebagaimana seharusnya". Meski demikian, ia mesti didasarkan pada filsafat teoretis yakni, pembahasan tentang segala sesuatu "sebagaimana adanya", termasuk di dalamnya metafisika.[1]

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal yang memiliki banyak arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak yaitu *ta etha* yang berarti *adat kebiasaan*. Kata

[1]M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 7.

ini kemudian mengalami perubahan hingga terbentuk menjadi kata "etika" sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Berdasarkan definisi tersebut, etika dapat diartikan ilmu tentang hal-hal yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.[2]

Secara umum, etika diidentikkan dengan moral atau moralitas. Akan tetapi, meski pembahasannya sama-sama mengenai baik dan buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Jika moral lebih condong kepada "nilai baik atau buruk tindakan manusia", maka etika dapat didefinisikan sebagai "ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk". Singkatnya, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk, sedangkan moral adalah praktiknya. Dalam disiplin ilmu filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral.[3]

Hubungan antara etika dan politik sejatinya telah melewati proses diskursus yang sangat panjang dalam tradisi filsafat dan pemikiran keislaman. Etika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral, berfungsi sebagai landasan normative perilaku manusia termasuk dalam konteks kehidupan politik. Di sisi lain, politik merupakan seni dalam mengatur, merumuskan kebijakan, dan menciptakan tata kelola masyarakat. Dari sini bisa dilihat bahwa hubungan etika dan politik muncul atas dasar kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan juga mengarah pada nilai-nilai etis yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.[4]

Adalah Mohammed Arkoun, salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang berkontribusi signifikan dalam membangun pendekatan kritis terhadap tradisi Islam dan modernitas. Salah satu aspek penting dalam pemikirannya ialah etika politik yang tidak hanya menggugat dominasi narasi tradisional tetapi juga mengupayakan pembaruan pemikiran agar relevan dengan konteks zaman. Artikel ini akan membahas gagasan etika Mohammed Arkoun dan relevansinya terhadap pemikiran keislaman.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* yang pengumpulan datanya diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan tema etika Mohammed Arkoun. Setelah data-data tersebut diperoleh dan disusun, kemudian dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan ialah deskriptif-analitis, yang mana data-data yang telah disusun dideskripsikan dan dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Islam dan Politik

Politik pada awalnya dimaknai sebagai pengelolaan *polis* di masa Yunani kuno, atau hal-hal mengenai polis (makna harafiahnya: kota; sering dipadankan dengan istilah "negara kota"). *Polis* merupakan tempat individu manusia bergabung. Aristoteles menyatakan, polis adalah tempat terbaik bagi manusia meleluasakan orang mencapai tujuannya, mencapai yang terbaik.[5] Manusia mengaktualisasi dirinya dan berfungsi optimal dalam kebersamaannya dengan manusia lain, di dalam *polis*. Politik mengikhtiarkan optimalnya kehidupan bersama sehingga aktualisasi diri dan fungsi optimal individu dapat berlangsung serta pencapaian kebahagiaan dapat dilakukan.[6]

Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa politik adalah implikasi dari kehidupan bersama. Keberadaan manusia dengan manusia lain di dunia, kehidupan bersama di sebuah wilayah, memerlukan pengaturan agar orang-orangnya dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dirinya masing-masing, Lebih jauh lagi bersama-sama mengembangkan dunia. Pengaturan menjadikan kebersamaan itu bukan sekadar kumpulan atau kerumunan orang, melainkan himpunan yang memiliki struktur dan aturan, sebuah masyarakat. Orang-orang yang terhimpun di dalamnya punya hak dan kewajiban, bukan

---

[2]K. Bertens, *Etika* (Gramedia, 2005). hlm. 5.

[3]Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 190.

[4]Michael J. Sandel, *Justice: What's The Right Thing to Do* (New York: Farrar, 2007), hlm. 4-5.

[5]Aristotle, *Politics*, ed. by H. Rackham, terjemah (Cambridge: Harvard University, 1959), hlm. 8-9.

[6]F. Budi Hardiman Dkk, *Empat Esai Etika Politik* (Jakarta: www.srimulyani.net, 2011), hlm. vii-viii.

hanya bertanggungjawab atas dirinya, tetapi juga orang lain. Mereka menjadi warga dari kebersamaan, bukan sekadar individu yang lepas dari individu lain. Politik menjadi fungsi pengaturan itu menghasilkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan kehidupan bersama, memungkinkan kehidupan bersama berlangsung terus.[7]

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretasi. Di sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi-interpretasi itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat berbeda mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.[8]

Umumnya, di kalangan umat Islam, ada satu memori kolektif yang sangat melekat yakni terdapat semacam doktrin *al-Islam huwa al-din wa al-daulah*. Islam adalah agama sekaligus kekuasaan.[9] Sehingga, hubungan antara agama dan negara, antara aspek ritual dan politik sangat erat kaitannya dan hampir tidak bisa dipisahkan. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.[10]

Meski Islam diyakini memberi pedoman dalam segala aspek kehidupan, khususnya di bidang pemerintahan dan politik, nyatanya hubungan agama dan negara dalam Islam sangat kaya akan penafsiran. Dalam Islam, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Secara umum, sekurang-kurangnya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara.[11]

*Pertama,* Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum muslim ialah wilayah risalah yang tidak dicampuri tendensi pemerintahan. Adapun tokoh terkenal yang mendukung aliran ini di antaranya Ali Raziq dan Taha Husein.[12] *Kedua,* Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala aspek, termasuk masalah negara atau system politik. Tokoh utama dari aliran ini meliputi, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan yang paling gencar ialah Abu al-A'la al-Maududi.[13] *Ketiga,* aliran ini menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala aspek dan menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta semata. Aliran ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala aspek, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan masyarakat dan negara. Karenanya, dalam bernegara umat Islam harus melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai etis yang diajarkan oleh Islam. Adapun tokoh aliran ini ialah, Muhammad Abduh dan Muhammad Husein Haikal.[14]

Lain halnya dengan Mohammed Arkoun, ia melihat hubungan agama dan negara dalam konteks sejarah dan perkembangan masyarakat Islam. Di masa klasik, Islam memiliki pendekatan yang dinamis terhadap politik, di mana agama dan kekuasaan saling berkaitan. Akan tetapi, pemahaman ini mengalami reduksi sepanjang sejarah karena pengaruh ideologi yang membatasi ruang kritis agama

---

[7] *Ibid.,* hlm. viii.

[8] Zaprulkhan, *Pengantar Filsafat Islam, Klasik, Modern, Dan Kontemporer* (Yogyakarta: IRcisoD, 2019), hlm. 264.

[9] Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 71.

[10] Zaprulkhan, *Pengantar Filsafat Islam, Klasik, Modern, Dan Kontemporer* (Yogyakarta: IRcisoD, 2019), hlm. 234.

[11] Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-2.

[12] Ali Abd. Raziq, *Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan* (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 77.

[13] Zaprulkhan, *Pengantar Filsafat Islam, Klasik, Modern, Dan Kontemporer*. hlm. 234.

[14] *Ibid.,* hlm. 235.

dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itulah Arkoun menekankan pembacaan ulang sejarah Islam dengan pendekatan historis secara kritis untuk memahami hubungan agama dan negara.[15]

**Tentang Mohammed Arkoun**

Mohammed Arkoun merupakan seorang filsuf Muslim terkemuka yang lahir pada 1 Februari 1928 di Taorirt Mimoun Kabilia, sebuah daerah pegunungan yang terletak di sebelah timur Aljir. Wilayah ini (Kabilia/Qabail)terbagi dalam dua bagian, yaitu Kabilia Besar dan Kabilia Kecil. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian (tin dan zaitun), mengembala ternak, dan menjual kerajinan tangan. Berdasarkan latar belakang social tersebut, Arkoun tumbuh dan bergelut dengan tiga bahasa yaitu bahasa Kabilia, bahasa Arab, dan bahasa Prancis.[16]

Mohammed Arkoun memulai pendidikannya di sekolah dasar yang ada di desanya Kabilia. Kemudian, Arkoun melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Pelabuhan Oran, sebuah kota di Aljazair bagian barat yang terletak jauh dari Kabilia. Dari tahun 1950 sampai 1954, ia belajar bahasa Arab di Universitas Aljir sembari mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah menengah di Al-Haurach, daerah pinggiran Ibu Kota Aljazair. Di tengah perang Aljazair dan pemerintah colonial Prancis (1954-1962), Arkoun mendaftar sebagai mahasiswa di Paris. Sejak saat itulah ia mulai menetap di Prancis. Meski pergaulannya banyak dipengaruhi oleh budaya Prancis, bidang utama studi dan penelitiannya tidak berubah yakni bahasa dan sastra Arab. Pada perkembangannya, Arkoun menaruh perhatiannya terhadap pemikiran Islam. Karenanya, ciri utama pemikiran Arkoun ialah memadukan antara pemikiran Islam dan Barat.[17]

Karya-karya Mohammed Arkoun yang paling penting adalah *Contribution a l`etude de l`Humanisme Arabe au IV/X siecle : Miskawayh philosophe et historien ; La pensee Arabe*. Sebuah disertasi yang ditulisnya untuk memperoleh gelar doctor sastra pada tahun 1969. Karya-karya lain Arkoun merupakan kumpulan artikelnya dan telah dipublikasikan dalam beberapa majalah, antara lain *Lectures du Coran* (Telaah tentang Qur`an), *Pour une crithique de la raison Islamiqhue; Essais sur lapensee Islamiqhue*. Sedangkan buku-buku Arkoun selain yang disebutkan diatas antara lain Aspects de la pensee musulmane Classique. Adapun karya Muhammed Arkoun yang lain adalah L`Islam, hier, demain (Islam, Kemarin dan Hari Esok). Buku ini merupakan karyanya bersama Louis Gardet; *L`Islam, Religion et Societe, Al-Fikr alIslamy : Qiraah Ilmiyyah; AL-Fikr al-Islamy: Naqd wa al-Ijtihad; AlIslam : al-Akhlaq wa al-Siyasah; Min Faishal al-Tafriqah ilaa fasl al-Maqal…. Aina huwa al-Fikry al-Islamy al-Muashir; Tarikhy al-fikr alAraby al-Islamy*.[18]

Perlu juga dicatat, bahwa kebanyakan karya Arkoun ditulis dalam bahasa Perancis meskipun sebenarnya ia sangat menguasai bahasa Arab. Dari beberapa tuturannya dapat diketahui bahwa kecenderungannya menulis dalam bahasa Perancis bukan tanpa alasan. Menurut Arkoun, ia mengalami banyak kesulitan untuk mengungkapkan pikirannya dalam bahasa Arab. Dalam sebuah artikelnya yang diterbitkan tahun 1983 Arkoun mengatakan bahwa kemajuan paling menentukan yang terjadi pemikiran ilmiah sejak tahun 1950- an belum tersedia dalam bahasa Arab atau bahasa yang dipergunakan di dunia Islam manapun.[19]

Dalam berbagai studinya mengenai Islam, Arkoun banyak menggunakan pendekatan dan metodologi ilmu-ilmu sosial dalam memahami Islam sebagai satu agama yang dianut oleh masyarakat majemuk di zaman modern. Arkoun bertolak dari paradigma penggunaan akal untuk mempertebal keimanan. Bahkan pemikirannya dianggap kritis dan tidak lazim terdengar oleh khalayak. Semenjak tinggal di Prancis pada tahun 1954, ia banyak mengenal dan mendalami berbagai teori dan metodologi

---

[15]Mohammaed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Boulder: Westview Press, 1994), hlm 34.

[16]Mohammed Arkoun, *Mohammed Arkoun, Nalar Islam Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru*, ed. by Rahasyu S. Hidayat, terjemah (1994). hlm. 19.

[17]Johan Hendrik Mauleman, 'Nalar Islam Dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun', *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan*, IV (1993).

[18]Arkoun, *Mohammed Arkoun, Nalar Islam Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru*. hlm. 21.

[19]*Ibid.*,

ilmu pengetahuan Barat. Dalam merumuskan pemikirannya, Arkoun merujuk kepada filsuf-filsuf Prancis seperti Paul Ricoeur, Michel Foucault, dan Jacques Derrida.[20]

Pemikir Barat lainnya yang mempengaruhi pemikiran Arkoun diantaranya yaitu Ferdinand de Saussure (ahli bahasa Swiss), Roland Barthes (ahli semiotika Prancis), Pierre Bourdieu (antropolog Prancis), Jack Goody (antropolog Inggris), dan Northrop Frye (ahli kesusastraan Kanada). Arkoun terus-menerus mencoba mencari pemahaman-pemahaman baru mengenai Islam dan umatnya dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat Modern. Upaya ini mendorong untuk memadukan unsur yang sangat mulia dalam pemikiran Islam (semangat keagamaan) dengan unsur yang sangat berharga dalam pemikiran Barat modern (rasionalis dan kritis). Dengan begitu ia berharap akan muncul suatu pemikiran Islam yang mana dapat memberikan jawaban terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Muslim saat ini, yaitu pemikiran yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya membebaskan umat Muslim dari berbagai belenggu yang dibuatnya sendiri, baik secara intelektual maupun politis.[21]

**Etika Politik Mohammed Arkoun**

Untuk benar-benar memahami visi-visi politik atau doktrin politik yang berkembang di dunia Islam, perlu ditegaskan di sini kebutuhan akan ilmu sosiologi (*ijtima'I al-Amal*). Ilmu ini tampaknya lebih mendesak dibandingkan dengan ilmu etika. Yang dimaksud dengan ilmu *ijtima'il al-amal* ialah kajian tentang harapan dan cita-cita yang diimpikan oleh umat Islam. Faktanya, kebijakan yang diambil oleh dinasti kerajaan sejak zaman Bani Umayyah telah berdampak pada setiap lapisan masyarakat, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda.

Karena itu, Arkoun memandang bahwa masyarakat Islam sudah terbiasa dengan istilah politik Islam tidak terpisahkan dengan agama, karena bagi Arkoun keduanya secara terstruktur saling berkaitan, sejak Nabi Muhammad sebagai figur yang mendirikan perangkat negara dan sistemnya yang berpusat di Madinah. Menurutnya Nabi secara pasti telah mendirikan "Negara Islam" di Madinah antara tahun 622 M sampai dengan 632 M, kemudian pada saat yang sama dia meneruskan untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an yang telah dimulai dari Mekkah tahun 610 M sampai 612 M. Setelah wafat, lembaga kekhalifahan terbentuk secara bertahap di Madinah yang pertama pada tahun 632 M sampai 661 M, kemudian berpindah di Damaskus pada tahun 661 M sampai 750 M dan yang ketiga dibentuk di Bagdad pada tahun 750 M hingga tahun 1258 M.[22]

Mohammed Arkoun merumuskan etika politik sebagai upaya mendekonstruksi otoritas politik dan keagamaan yang bersifat hegemonik. Arkoun menilai bahwa sering kali otoritas politik menggunakan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga mengabaikan aspek humanisme dan keadilan sosial. Karena itu, Arkoun menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip islam dengan humanisme universal.[23]

Adapun poin-poin utama dalam etika politik Mohammed Arkoun ialah sebagai berikut:

a. Kritik atas Tradisi Islam dan Modernitas

   Arkoun memandang bahwa tradisi Islam perlu dikaji ulang dengan menggunakan pendekatan kritis. Ia juga mengkritik cara pandang tradisional dalam memahami politik Islam yang seringkali diwarnai oleh pemahaman skriptualis dan apologetic. Bagi arkoun, etika politik Islam harus dikontekstualisasikan dengan realitas modern untuk mencegah dan menghindari stagnasi pemikiran. Selain itu, Arkoun juga mengkritik modernisme Barat, terutama paham sekularisme yang cenderung memisahkan agama dengan ranah public.[24]

---

[20]Moh. Fauzan Januri and Muhammad Alfan, *Dialog Pemikiran Timur-Barat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 215.

[21]Siti Rohmah Soekarba, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun* (Depok: LSM MALES ARTS STUDIO, 2019), hlm. 17.

[22]Mohammed Arkoun, *Membongkar Wacana Hegomoni Dalam Islam Dan Post Modernisme (Aina Al-Fikru Al-Islami Al-Muasir)* (Surabaya: Al-Fikr, 1999), hlm. 274.

[23]Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: Saqi Books, 2002), hlm. 87.

[24]Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers,* hlm. 23-25.

b. Dekonstruksi Narasi politik Agama

Dalam mengkaji narasi-narasi politik dalam tradisi Islam, Arkoun menerapkan metode dekonstruksi. Ia kemudian membedakan antara *islam historis* dan *islam ideal*. Dalam konteks politik, Arkoun menyoroti bahwa banyak negara muslim yang telah menyalahgunakan agama untuk melegitimasi kekuasaan. Akibatnya, penyalahgunaan ini menegasikan nilai-nilai etis universal dalam Islam seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.[25]

c. Humanisme dalam Politik

Inti dari etika politik Mohammed Arkoun ialah perjuangan atas nilai-nilai humanisme yang berarti kebijakan public dan system pemerintahan harus berorientasi pada pemajuan martabat manusia. Arkoun mengkritik kebijakan politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia secara holistic.[26]

Sebagai bentuk konkret dari humanisme dalam politik, itulah mengapa diperlukannya pendidikan kritis. Arkoun percaya bahwa pendidikan yang membebaskan dapat menjadi alat baru dalam transformasi sosial dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memahami bahwa etika politik yang berlandaskan humanisme mampu menjembatani dialog antara agama dan negara.[27]

d. Pluralisme dan Demokrasi

Pluralisme merupakan pondasi yang tak terpisahkan dari etika politik yang inklusif. Islam memiliki warisan intelektual yang kaya dalam mendukung pluralisme. Namun, Arkoun mengkritik bagaimana warisan ini telah direduksi dalam praktik politik. Arkoun menegaskan bahwa pluralisme haruslah dipahami sebagai cara hidup bersama yang menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan maupun budaya.[28]

Untuk mencapai demokrasi berbasis pluralisme ini, Arkoun menawarkan pendekatan *islamologi terapan*, yang mana pendekatan ini menekankan pentingnya mengkaji Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai fenomena historis, budaya dan politik. Melalui pendekatan ini, umat Islam diajak untuk memahami teks-teks keagamaan secara kritis dan konseptual, sehingga menghasilkan nilai-nilai politik yang relevan dengan perkembangan zaman.[29]

**Relevansi Etika Politik Arkoun Terhadap Pemikiran Keislaman**

Dalam perspektif pemikiran Mohammed Arkoun, wilayah pemikiran yang masih perawan (*unthought*) dalam wilayah *Islamic studies* sudah seharusnya untuk terus dipikirkan. Telaah kritis tersebut dilakukan dengan cara meninggalkan epistemologi keislaman klasik, menuju ke epistemologi keislaman kontemporer. Sebagai konsekuensinya adalah perlu adanya pengkajian ulang sejarah Islam. Studi Islam era mendatang harus mengakomodasi *social and cultural studies* kontemporer. Arkoun juga mengemukakan tentang perlunya pemahaman baru tentang sekularisasi. Sekularisasi di sini bukan berarti pemisahan agama dan negara (konotasi politik), tetapi lebih pada upaya penduniawian (sekularisasi) nilai-nilai Islam yang terkait ruang dan waktu, serta pentingnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang saling berbeda sesuai konteks (*episteme*) zamannya. Dengan demikian, pengembalian tradisional kepada agama bukanlah alternatif masa depan.[30]

Adapun yang menjadi implikasi praktis dari etika politik Arkoun dapat dijabarkan sebagai berikut: bahwa dalam wacana tentang etika politik perlu dibedakan antara etika individu yang lebih berpedoman pada adanya niat baik, seperti sikap jujur, bertanggung jawab mapun cinta keadilan. Namun, selain itu, ada dimensi etika politik lain yang lebih dikenal dengan etika sosial, sebagai formulasi konkrit dari etika individual di atas. Dengan kata lain, dalam kehidupan interaktif manusia di dunia ini tidak cukup hanya dilandasi dengan nilai-nilai etika individual yang masih bersifat abstrak dan hanya

[25]Mohammed Arkoun, *Islam: To Reform or to Subvert* (London: Saqi Books, 2006), hlm. 89-91.

[26]Mohammed Arkoun, 'Islam, Modernity, and Humanism', *Muslim World,* vol. 70 (1980), hlm. 10.

[27]*Ibid.,* hlm. 13.

[28]Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers,* hlm. 67.

[29]Arkoun, 'Islam, Modernity, and Humanism', hlm. 13.

[30]Muhammad Azhar, 'Etika Politik Mohammed Arkoun', *Ishraqi,* Vol. 10, N (2012), hlm. 23.

tergantung pada kemauan baik seseorang. Namun secara kolektif masyarakat juga harus memiliki pegangan kolektif berupa penjabaran realistik dari etika individual dimaksud, yakni etika sosial.[31]

Dampak dari pemikiran Arkoun adalah munculnya multitafsir teks keagamaan dan kian terbukanya 'kedok ideologis' umat beragama, baik secara internal maupun eksternal. Secara jangka panjang, hal ini berdampak positif pada diri umat agar menjadi lebih kritis, rasional, demokratis dan munculnya sikap saling menghargai satu sama lain.

## PENUTUP

Pemikiran politik Arkoun pada hakikatnya sangat terkait erat dengan basis epistemologi pemikiran keislamannya yakni Islamologi Terapan, yang mengandaikan adanya pembacaan ulang khazanah pemikiran Islam (*deconstruction of Islamic thought*); upaya komparasi berbagai khazanah pemikiran (Islam-Barat); keluar dari logosentrisme pemikiran Islam klasik menuju epistemologi keislaman kontemporer melalui upaya pemanfaatan semiotika dan *social sciences*. Berdasarkan paradigma Islamologi terapan di atas, salah satu derivasi pemikiran Arkoun sebagai fokus penelitian ini adalah implikasinya di bidang pemikiran Etika politik Islam. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan tentang urgensi relasi simbiotik antara agama dan politik, dimana nilai-nilai religiusitas keagamaan dapat ditampilkan sebagai *content*, sedangkan Negara sebagai bingkainya. Adapun poin-poin utama dalam etika politik Mohammed Arkoun ialah; 1) kritik atas tradisi islam dan modernitas, 2) dekonstruksi narasi politik agama, 3) humanisme dalam politik, dan 4) pluralisme dan demokrasi. Rumusan etika politik Arkoun juga menunjukkan upaya mendekonstruksi otoritas politik dan keagamaan yang bersifat hegemonic.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Ghazali Dan Kant, Filsafat Etika Islam* (IRCiSoD, 2020)

Alfan, Moh. Fauzan Januri and Muhammad, *Dialog Pemikiran Timur-Barat* (Pustaka Setia, 2011)

Aristotle, *Politics*, ed. by H. Rackham, terjemah (Harvard University, 1959)

Arkoun, Mohammaed, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (Westview Press, 1994)

Arkoun, Mohammed, 'Islam, Modernity, and Humanism', *Muslim World*, 70 (1980)

———, *Islam: To Reform or to Subvert* (Saqi Books, 2006)

———, *Membongkar Wacana Hegomoni Dalam Islam Dan Post Modernisme (Aina Al-Fikru Al-Islami Al-Muasir)* (Al-Fikr, 1999)

———, *Mohammed Arkoun, Nalar Islam Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan Dan Jalan Baru*, ed. by Rahasyu S. Hidayat, terjemah (1994)

———, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (Saqi Books, 2002)

Azhar, Muhammad, 'ETIKA POLITIK MOHAMMED ARKOUN', *Ishraqi*, Vol. 10, N (2012)

Bagir, Haidar, *Buku Saku Filsafat Islam* (Mizan, 2005)

Bertens, K., *Etika* (Gramedia, 2005)

Dkk, F. Budi Hardiman, *Empat Esai Etika Politik* (www.srimulyani.net, 2011)

Mauleman, Johan Hendrik, 'Nalar Islam Dan Nalar Modern: Memperkenalkan Pemikiran Mohammed Arkoun', *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan*, IV (1993)

Piscatori, Dale F. Eickelman dan James, *Ekspresi Politik Muslim* (Mizan, 1998)

Raziq, Ali Abd., *Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan* (Jendela, 2002)

Sandel, Michael J., *Justice: What's The Right Thing to Do* (Farrar, 2007)

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara* (UI Press, 1993)

Soekarba, Siti Rohmah, *Dekonstruksi Dan Pemikiran Mohammed Arkoun* (LSM MALES ARTS STUDIO, 2019)

Zaprulkhan, *Pengantar Filsafat Islam, Klasik, Modern, Dan Kontemporer* (IRcisoD, 2019)


[31] *Ibid.,* hlm. 28.